

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

#### 2.1 Tinjau Pustaka

Tinjau pustaka akan menjelaskan bagaimana variable-variable penelitian akan dikaitkan dengan teori besar (*Grand theory*) yang relevan, sehingga memberikan pemahaman yang lebih komperhensif.

##### 2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2025), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia yang dilihat dari tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut menjadi cerminan sejauh mana masyarakat dapat mengakses hasil pembangunan secara merata.

IPM pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 sebagai salah satu indikator alternatif selain pendapatan per kapita untuk mengukur kesejahteraan manusia (UNDP, 2024). Menurut pendekatan ini, pembangunan manusia tidak hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari perluasan pilihan dan kemampuan (*capabilities*) manusia dalam menjalani kehidupan yang bernilai. Lebih lanjut, Todaro dan Smith (2020) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi sejati harus mampu meningkatkan kemampuan manusia untuk berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial. Dengan demikian, IPM menjadi alat ukur penting dalam menilai apakah pembangunan ekonomi suatu daerah telah berhasil meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

Namun demikian, peningkatan IPM tidak selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Hidayat & Prasetyo (2022) menemukan bahwa ketimpangan wilayah, perbedaan kualitas pendidikan, dan keterbatasan akses kesehatan menjadi penyebab utama perbedaan nilai IPM antarprovinsi di Indonesia. Hal ini menandakan bahwa pembangunan manusia bersifat multidimensi dan membutuhkan dukungan kebijakan fiskal serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (2023) Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang dihitung dengan menggunakan rata-rata geometrik yang terdiri dari indeks harapan hidup, indeks pendidikan (harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indeks pengeluaran, yang mana dimensi pendidikan dihitung dengan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), yang mencerminkan jumlah tahun yang dihabiskan oleh individu berusia 15 tahun ke atas dalam mengikuti pendidikan formal. Perhitungan RLS dilakukan berdasarkan jumlah penduduk yang berusia di atas 25 tahun. Selain mengasumsikan bahwa pendidikan berakhir pada usia 25 tahun, perhitungan ini juga mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh UNDP. Rumus perhitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yaitu:

$$IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

Selain RLS, dalam dimensi pendidikan juga terdapat Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS ini mengukur jumlah tahun pendidikan yang diperkirakan akan ditempuh oleh anak pada usia tertentu di masa depan. HLS ini juga digunakan untuk menilai perkembangan sistem pendidikan di berbagai jenjang, yang dihitung

dalam bentuk tahunan, serta untuk menggambarkan tingkat pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Rumus perhitungan Harapan Lama Sekolah (HLS) yaitu:

$$IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

Dan untuk menghitung indeks pendidikan secara keseluruhan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{pendidikan} = \frac{(IHLS + IRLS)}{2}$$

Dalam dimensi kesehatan, pengukuran dilakukan melalui Angka Harapan Hidup (AHH). AHH adalah perkiraan rata-rata tahun yang dapat dijalani oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan tingkat dan ukuran derajat kesehatan suatu populasi. Rumus Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu:

$$Ikesehatan = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

Selanjutnya yang terakhir adalah dimensi pengeluaran perkapita yang disesuaikan dihitung berdasarkan nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (purchasing power parity). Rata-rata pengeluaran perkapita pertahun ini yang diperoleh melalui survei yang dihitung dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Rumus perhitungan pengeluaran perkapita yaitu:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran min})}{n (\text{pengeluaran max}) - \ln(\text{pengeluaran min})}$$

Setelah mendapatkan data di atas, dilanjutkan dengan rumus IPM secara keseluruhan yang mana dirumuskan sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{Ikesehatan \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

Nilai indeks hasil hitungan masing-masing komponen tersebut berkisaran antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Dalam laporan ini indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100) untuk mempermudah penafsiran seperti yang disarankan oleh BPS. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok:

1. Kelompok “sangat tinggi”:  $IPM \geq 80$
2. Kelompok “tinggi”:  $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok “sedang”:  $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok “rendah”:  $IPM < 60$

#### **2.1.1.1 Teori Kapabilitas**

Landasan teori pada indeks pembangunan manusia berakar pada *Human Development Theory* yang diperkenalkan oleh Amarty Sen dan kemudian dikembangkan oleh UNDP. Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan tidak hanya diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, tetapi berdasarkan perluasan kemampuan (*capabilities*) manusia dalam menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Sen menegaskan bahwa esensi pembangunan adalah memberikan peluang yang lebih luas kepada manusia untuk hidup sehat, berpendidikan, serta memperoleh standar hidup layak. Kemudian peningkatan IPM tidak hanya dipengaruhi faktor sosial tetapi juga oleh kebijakan fiskal dan kapasitas keuangan pemerintah. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa daerah dengan kemampuan fiskal yang kuat cenderung memiliki IPM yang lebih tinggi karena mampu membiayai layanan publik secara memadai (Sari & Wibiwo, 2023).

### 2.1.1.2 Teori *Human Capital*

Teori Modal Manusia (*Human Capital Theory*) yang dipelopori oleh peraih Nobel ekonomi, Gary Becker (1964). Teori ini memposisikan manusia bukan sekadar sebagai faktor produksi pasif, melainkan sebagai bentuk kapital atau modal yang nilai produktivitasnya dapat ditingkatkan melalui serangkaian investasi yang terencana. Becker berargumen bahwa individu atau pemerintah yang mengalokasikan sumber daya untuk pendidikan, pelatihan, dan kesehatan sebenarnya sedang melakukan investasi untuk memperoleh imbal hasil (*return*) di masa depan dalam bentuk peningkatan kualitas hidup dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam perspektif Becker, modal manusia tidak bersifat statis ia dapat mengalami pertumbuhan melalui akumulasi pengetahuan dan perbaikan kondisi fisik (kesehatan), namun ia juga dapat mengalami depresiasi jika tidak dirawat melalui kebijakan perlindungan sosial yang tepat. Oleh karena itu, pembangunan suatu wilayah dalam kerangka teori ini diukur dari seberapa besar stok modal manusia (*human capital stock*) yang dimiliki. Dalam penelitian ini, stok modal manusia tersebut diproksikan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mengintegrasikan dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak ke dalam satu ukuran capaian pembangunan yang komprehensif. Investasi Fiskal sebagai Penggerak Modal Manusia Hubungan antara variabel independen (PAD, Dana Otsus, dan Belanja Bansos) terhadap IPM dapat dijelaskan melalui mekanisme investasi modal manusia.

Dalam buku *Pembangunan Ekonomi*, Todaro dan Smith menegaskan bahwa investasi di bidang pendidikan dan kesehatan memiliki karakteristik spillover benefit, yaitu manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu yang menerima investasi tersebut, tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, intervensi pemerintah dalam pembiayaan pendidikan dan kesehatan menjadi sangat penting, terutama di wilayah dengan keterbatasan akses dan kapasitas ekonomi.

Konsep modal manusia ini menjadi landasan teoritis yang kuat dalam menjelaskan hubungan antara kebijakan fiskal pemerintah dan peningkatan IPM, karena komponen IPM secara langsung mencerminkan hasil dari investasi pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat.

#### 1. Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen utama dalam pembangunan manusia karena berperan langsung dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurut teori modal manusia (Becker, 1964), pendidikan dipandang sebagai investasi jangka panjang yang mampu meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas individu, sehingga berimplikasi pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan di masa depan.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, Todaro dan Smith (2015) menegaskan bahwa pendidikan berfungsi memperluas pilihan hidup manusia melalui peningkatan kapasitas intelektual dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi. Individu yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap lapangan kerja formal, pendapatan yang lebih stabil, serta kemampuan pengambilan keputusan ekonomi yang lebih rasional.

Keterkaitan pendidikan dengan Indeks Pembangunan Manusia tercermin melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Oleh karena itu, peningkatan IPM sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.

Dalam konteks kebijakan fiskal daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) berperan penting dalam mendukung pembiayaan sektor pendidikan, seperti pembangunan infrastruktur sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta program afirmatif bagi masyarakat di wilayah tertinggal. Sementara itu, belanja bantuan sosial turut berkontribusi secara tidak langsung dengan menjaga keberlangsungan pendidikan kelompok rentan melalui bantuan pendidikan dan pengurangan beban ekonomi rumah tangga.

## 2. Kesehatan

Kesehatan merupakan dimensi fundamental dalam pembangunan manusia karena menentukan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Todaro dan Smith (2015) menyatakan bahwa kesehatan bukan hanya hasil dari pembangunan, tetapi juga prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Individu yang sehat memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, usia kerja yang lebih panjang, serta risiko kemiskinan yang lebih rendah.

Dalam teori modal manusia, investasi di bidang kesehatan dipandang sebagai upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui peningkatan daya tahan fisik dan mental. World Health Organization (2000) menekankan bahwa sistem kesehatan yang efektif berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan sosial.

Dalam pengukuran IPM, dimensi kesehatan direpresentasikan oleh Angka Harapan Hidup (AHH). Rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, buruknya kualitas gizi, serta keterbatasan fasilitas medis dapat menurunkan capaian IPM meskipun terdapat peningkatan pada dimensi lainnya.

Peran kebijakan fiskal sangat krusial dalam sektor kesehatan, terutama melalui pemanfaatan Dana Otonomi Khusus yang diarahkan untuk memperluas akses layanan kesehatan di daerah dengan keterbatasan geografis seperti Papua. Selain itu, belanja bantuan sosial berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang membantu masyarakat miskin memperoleh akses layanan kesehatan dasar, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas hidup dan IPM secara keseluruhan.

### 3. Ekonomi/ Standar Hidup Layak

Standar hidup layak merupakan dimensi ekonomi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan kemampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Dalam pengukuran IPM, dimensi ini direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan dengan daya beli, sebagai indikator kesejahteraan ekonomi masyarakat (BPS, 2024).

Menurut Todaro dan Smith (2015), pembangunan ekonomi tidak cukup diukur dari pertumbuhan pendapatan semata, tetapi dari sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup layak dan bermartabat. Sejalan dengan itu, pendekatan *capability* Amartya Sen (1999) menegaskan bahwa pendapatan merupakan sarana untuk memperluas pilihan dan kualitas hidup manusia, termasuk akses terhadap pendidikan dan kesehatan.

Dalam konteks fiskal daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan kapasitas ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Peningkatan PAD memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk mendorong aktivitas ekonomi produktif dan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap peningkatan standar hidup layak.

Selain itu, Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Papua berfungsi sebagai instrumen afirmatif untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam mengatasi keterbatasan ekonomi struktural. Melalui intervensi fiskal yang lebih besar, Dana Otsus secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan standar hidup masyarakat dan mendukung capaian IPM.

Sementara itu, belanja bantuan sosial berperan sebagai jaring pengaman sosial yang menjaga konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan. Meskipun bersifat jangka pendek, bantuan sosial membantu mempertahankan standar hidup layak dan mencegah penurunan kualitas pembangunan manusia.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dengan bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Menurut Halim (2004:96) pendapatan asli daerah merupakan semua penerima yang diperoleh daerah bersumber dari wilayahnya sendiri dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan Pembangunan daerah.

Menurut Halim (2007:67) unsur-unsur pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah

UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah

2. Restribusi Daerah

Restribusi adalah pendapatan atas pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Maksudnya adalah pendapatan yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah (*Dividen*) atas penyeretan modal pada BUMN dan BUMD.

4. Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Adalah pendapatan asli daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **2.1.3 Dana Otonomi Khusus**

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) merupakan bentuk kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dengan status otonomi khusus, dalam hal ini Provinsi Papua dan Papua Barat. Kebijakan ini pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 guna memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam penggunaan Dana Otsus.

Secara teknis, pelaksanaan Dana Otsus dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Otonomi Khusus Papua, yang menegaskan bahwa Dana Otsus bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan khusus Papua di bidang pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua (Kementrian Keuangan, 2023).

Menurut DJPK (2023), Dana Otsus merupakan bentuk fiskal transfer yang bertujuan memperkecil kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah serta memperluas kapasitas fiskal pemerintah daerah agar mampu mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokal masyarakat Papua. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan manusia dan ekonomi berbasis kearifan lokal.

#### **2.1.3.1 Jenis-Jenis Dana Otonomi Khusus**

Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan DJPK (2023), Dana Otsus terdiri atas tiga komponen utama, yaitu:

### 1) Dana Otonomi Khusus Reguler

Dana ini bersumber dari 2,25% dari total Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. Penggunaan Dana Otsus Reguler difokuskan pada sektor-sektor prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan ketentuan DJPK (2023), minimal 30% dari Dana Otsus harus dialokasikan untuk pendidikan dan 20% untuk kesehatan. Fokus ini selaras dengan tujuan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), terutama dalam hal peningkatan angka melek huruf, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan harapan hidup masyarakat Papua.

### 2) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI)

Komponen ini diarahkan untuk pembangunan fisik dan konektivitas wilayah. Menurut DJPK (2022), DTI berperan penting dalam pembangunan jalan, jembatan, jaringan listrik, dan sarana air bersih di wilayah terpencil Papua. Peningkatan infrastruktur ini mendorong aktivitas ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, DTI berkontribusi langsung terhadap peningkatan dimensi accessibility dalam pembangunan manusia (Bappenas, 2022).

### 3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) Khusus Papua

Berdasarkan Pasal 39 PP Nomor 107 Tahun 2021, Papua memperoleh 70% dari penerimaan minyak bumi dan gas alam yang dihasilkan dari wilayahnya. Menurut DJPK (2023), kebijakan ini merupakan bentuk afirmasi fiskal untuk memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya alam. Dana bagi hasil ini digunakan untuk pengembangan ekonomi lokal, peningkatan kapasitas produksi

masyarakat, dan penciptaan lapangan kerja baru. Secara teori, peningkatan kemampuan fiskal daerah melalui bagi hasil SDA dapat memperkuat *fiscal self-reliance* yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan IPM masyarakat Papua.

#### **2.1.4 Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial merupakan bagian dari kebijakan fiskal daerah maupun pusat yang bertujuan untuk memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, rentan, dan terdampak risiko sosial. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk uang atau barang yang bersifat tidak terus-menerus dan selektif berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan kemanusiaan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan sosial, termasuk penyediaan bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dalam konteks nasional, kebijakan ini juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menegaskan bahwa perlindungan sosial merupakan bagian integral dari pembangunan manusia berkelanjutan.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (2023), belanja bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial, yang pada

akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### **2.1.4.1 Jenis Belanja Bantuan Sosial**

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2020 dan DJA (2023), belanja bantuan sosial dibedakan ke dalam beberapa jenis utama, yaitu:

##### 1). Bantuan Sosial Tunai (BST)

Merupakan bantuan langsung dalam bentuk uang yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin untuk menjaga daya beli dan konsumsi rumah tangga. Dalam konteks Papua, kebijakan BST menjadi penting karena tingkat kemiskinan di beberapa wilayah masih tergolong tinggi, mencapai 26,1% pada tahun 2023, jauh di atas rata-rata nasional 9,4% (BPS, 2023).

##### 2). Bantuan Sosial Non-Tunai

Meliputi bantuan berupa sembako, subsidi pendidikan, dan bantuan pangan.

Program ini sering kali disinergikan dengan program nasional seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, yang tujuannya adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin.

##### 3). Bantuan Sosial Bersifat Darurat atau Bencana

Ditujukan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam, konflik sosial, atau keadaan darurat lainnya. Jenis bantuan ini relevan di Papua yang memiliki kerentanan terhadap bencana alam dan kondisi geografis yang menantang.

#### **2.1.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan- kumpulan studi yang telah diselesaikan sebelumnya, yang relevan dengan topik yang akan dibahas dalam

penelitian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melakukan perbandingan mendalam dan memberikan validasi terhadap hasil analisis yang telah diperoleh. Ringkasan dari penelitian terdahulu disajikan dalam tabel berikut;

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pengaruh dana otonomi khusus terhadap Pembangunan manusia di kota langsa Nurliana dan Syarifah Syafira 2019	Dana Otonomi Khusus	-Pendapatan Asli Daerah - Bantuan Sosial	Dana Otonomi Khusus secara langsung berpengaruh signifikan	Jurnal penelitian ekonomi akuntansi (JENSI), Vol.3, No.2, 2019.
2.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jakarta Tahun 2015-2022 Harun Alrasyid Agus Tri Indah K 2023	Pendapatan Asli Daerah	- Dana Otonomi Khusus dan - Belanja Bantuan Sosial	- Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap - Belanja modal tidak memiliki pengaruh negatif	Riset&Jurnal Akuntansi, Vol.7, No.4, 2023.
3.	Dampak Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia di Pemerintahan Kaupaten/Kota	Pendapatan asli daerah	-Dana Otonomi Khusus -Belanja Bantuan Sosial	Dana alokasi dan pendapatan asli daerah berpengaruh positif	Jurnal ilmiah mahasiswa pendidikan Sejarah Vol.8, No.3,2023

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2022. Harsya Saputra 2023				
4	Pengaruh Belanja Pendidikan, Belanja Kesehatan, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTB 2013-2022 -Iwan Harsono -Isna Purnama -Muhammad Firmansyah -Muhammad Irwan -Himawan Sutanto 2024	Belanja Bantuan Sosial	Pendapatan Asli Daerah Dana Otonomi Khusus	Belanja Pendidikan belanja Kesehatan dan belanja bantuan sosial berpengaruh positif	<i>Management Studis and Enterpenurship Journal</i> , Vol. 5, No.1, 2024.
5.	Pengaruh Dana Otonomi Khusus , Pengeluaran Perkapita, Umur Harapan Hidup Saat Lahir, Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Papua pada tahun 2014-2022. -Ryana Syafira -Rifki Khoirudin	Dana Otonomi Khusus	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Bantuan Sosial	-Dana otonomi khusus pengaruh negative serta tidak signifikan Penegluaran perkapita Umur harapan hidup saat lahir, Harapan lama sekolah, dan -Rata rata lama	<i>Jurnal simic economic</i> , Vol.7, No.1, 2023.

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	-Indanazulfa Qurrota A'yun 2023			sekolah berpengaruh positif	
6.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dana perimbangan dan pengeluaran Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten tuluanggung Christian Thomas dan Ignatia Martha Hendarti 2023	Pendapatan Asli Daerah	Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial	Dana perimbangan dan pengeluaran Pendidikan berpengaruh positif dan PAD tidak berpengaruh	<i>Journal of Accounting law Community and technolog</i> <i>Vol.1, No.2, 2024.</i>
7.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Era Mustika Ginting Fikri Ardiansyah Pulungan Fildzah Daryani Mujasmaraa Rebecka Tri Talita Indra Maipita Muammar Rinaldi 2024	Pendapatan Asli Daerah	-Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial	Pendapatan asli daerah dan Dana perimbangan berpengaruh signifikan. Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan	<i>Journal of Accounting Law Communication and Technology</i> , Vol.1, No.2, 2024.

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah adan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	Pendapatan Asli Daerah	Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial	PAD dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan	Menara Ekonomi, Vol.8, No.1, 2022
9.	Pengaruh Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh 2008-2020. Arisa Arsipen Dewi Rahmi 2021	Dana Otonomi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah	Belanja Bantuan Sosial	-DOK dan PAD berpengaruh secara signifikan. -DOK berpengaruh negatif	Jurnal riset ilmu ekonomi Vol.1, No.2 2021.
10.	Analisis Pengaruh PAD , Penegluaran Pemerintah dan UMK Terhadap IPM di Kabupaten Mimika Petrus Aldoanus Jahang Febri Yanto Arsitho Wenhen Arniati Tasik Rara 2024	PAD	Belanja Bantuan Sosial dan Dana Otonomi Khusus	- Pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh signifikan - Pendapatan asli daerah dan upah minimum kabupaten berpengaruh signifikan	<i>Journal of Economic, Busniess and Accountin g</i> Vol.7, No.4, 2024.
11	Pengaruh Pendataan Asli	PAD	Dana Otonomi	Pendapatan asli daerah	Jurnal Ilmu

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah (PAD) Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) -Edy Sahlan -Yusuf -Dodo Susanto 2023		Khusus dan Belanja Bantuan Sosial	tidak berpengaruh secara signifikan	Hukum dan Administrasi, Vol.4, No.1, 2022.
12	Pengaruh DAU, DAK Fisik dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kalimantan Barat Herlambang Febriyanto 2022	PAD	Dana Otonomi Khusus Belanja Bantuan Sosial	DAU, DAK Fisik dan PAD berpengaruh signifikan	Jurnal Akuntansi dan Ekonomi. Vol.7, No.3,2022
13	Analisis Pengaruh PAD,DAU,DAK dan DBH terhadap Indeks Pembangunan Manusia seluruh provinsi di Kalimantan tahun anggaran 2015-2019 Evi Sulatri Efendri 2020	PAD	Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial	- Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil positif signifikan, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus negatif signifikan	Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis, Vol.6, No.2, 2022.
14	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan	PAD	Dana Otonomi Khusus BELanja Bantuan Sosial	-Pendapatn Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Manusia di Sulawesi Utara 2004-2022 Elsa Novri Regina Joko Suharianto Intan Febyanti Syaila Azzahraini Siregar 2024			positif signifikan	at Indonesia Vol.2, No.1, 2024
15	Pengaruh PAD dan Jumlah Angkatan Kerja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Atika Nurhabibah Arfida Boedirochminarni Novi Primita Sari 2022	PAD	Dana Otonomi Khusus Belanja Bantuan Sosial	PAD dan Jumlah Angkatan Kerja berpengaruh positif	Jurnal ilmu Ekonomi Vol.6, No.1, 2022.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pembangunan manusia merupakan tujuan utama dalam proses pembangunan daerah yang tidak hanya menekankan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator komprehensif untuk menilai keberhasilan pembangunan tersebut karena mencerminkan capaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal dan pembangunan di tingkat daerah.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola sumber-sumber pendanaan guna mendorong pembangunan manusia. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Otonomi Khusus, serta Belanja Bantuan Sosial merupakan instrumen fiskal yang secara teoritis diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyediakan pelayanan publik dasar yang berkualitas. Melalui pengelolaan fiskal yang optimal, ketiga instrumen tersebut diharapkan dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendorong perbaikan capaian IPM.

Namun demikian, kondisi empiris menunjukkan bahwa besarnya dukungan fiskal yang diterima suatu daerah tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia. Provinsi Papua, sebagai daerah dengan kekhususan fiskal melalui Dana Otonomi Khusus, masih menghadapi tantangan dalam mencapai tingkat IPM yang optimal dibandingkan dengan besarnya sumber daya fiskal yang dimiliki. Fenomena ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan anggaran daerah, sehingga perlu dianalisis lebih lanjut hubungan antara PAD, Dana Otonomi Khusus, dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

### **2.2.1 Hubungan Pendapatan Asli Daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai Basis Investasi Mandiri Menurut Teori Modal Manusia, investasi memerlukan ketersediaan sumber daya finansial. PAD mencerminkan kemampuan fiskal internal suatu daerah untuk mendanai

penyediaan barang publik (*public goods*). Secara teoretis, semakin tinggi PAD, semakin besar kapasitas pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan infrastruktur sosial secara berkelanjutan. Investasi dari PAD dialokasikan untuk membiayai fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan dasar yang menjadi syarat mutlak dalam pembentukan modal manusia. Dengan demikian, PAD bertindak sebagai mesin penggerak utama dalam pembiayaan pembangunan manusia yang bersifat mandiri dan jangka panjang.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati dan Siregar (2021) menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh positif terhadap IPM di Indonesia. Peningkatan PAD memberikan ruang fiskal yang lebih luas bagi daerah untuk meningkatkan belanja pembangunan manusia, seperti penyediaan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Namun, efektivitasnya bergantung pada bagaimana PAD dialokasikan jika lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, dampaknya terhadap IPM menjadi kecil. Sejalan dengan itu, Kurniawati dan Nurdin (2020) juga menemukan bahwa PAD berkontribusi positif terhadap peningkatan IPM, meskipun dalam beberapa daerah kontribusinya belum optimal karena rendahnya kapasitas fiskal dan ketergantungan pada transfer pusat.

### **2.2.2 Hubungan Dana Otonomi Khusus dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah yang memiliki karakteristik khusus seperti Papua (UU No. 2 Tahun 2021). Dana Otonomi Khusus (Otsus) sebagai Injeksi Modal Afirmatif Dalam kondisi di mana suatu daerah memiliki stok modal manusia awal

yang rendah atau mengalami hambatan geografis dan historis, teori ini mengenal konsep investasi tambahan untuk mempercepat pengejaran ketertinggalan (*catch-up effect*). Dana Otonomi Khusus merupakan instrumen kebijakan afirmatif yang dirancang sebagai injeksi modal besar (*big push*) dari pemerintah pusat kepada daerah khusus. Sesuai amanat teori modal manusia, dana ini secara spesifik ditujukan untuk membiayai "kebutuhan dasar manusia" melalui beasiswa dan peningkatan akses jaminan kesehatan. Investasi masif melalui dana transfer ini diharapkan dapat menaikkan nilai harapan lama sekolah dan angka harapan hidup secara signifikan dalam waktu yang lebih cepat.

Namun, Suryani dan Kurniawan (2022) menemukan bahwa meskipun Dana Otsus di Papua relatif besar, efektivitasnya terhadap peningkatan IPM masih rendah akibat lemahnya tata kelola dan ketidaktepatan sasaran penggunaan dana. Sementara Pattiasina et al. (2023) yang meneliti kasus Aceh menemukan efek positif Dana Otsus terhadap IPM jika dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

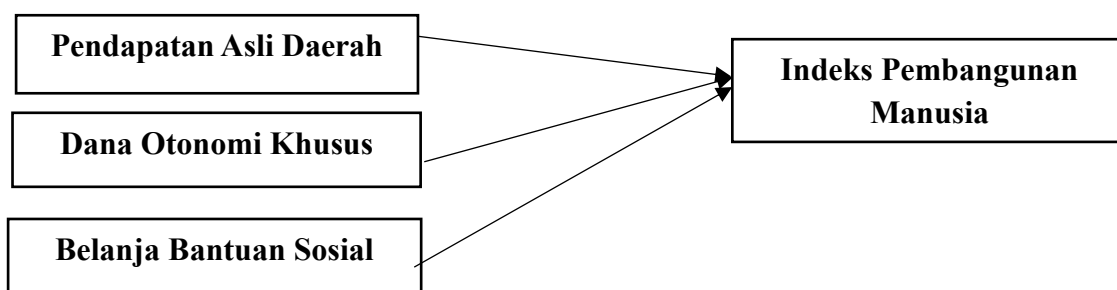
### **2.2.3 Hubungan Belanja Bantuan Sosial dengan Indeks Pembangunan Manusia**

Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebagai Investasi Perlindungan Modal Gary Becker menekankan bahwa kesehatan dan nutrisi adalah investasi modal manusia yang paling fundamental, karena tanpa kondisi fisik yang sehat, investasi pendidikan tidak akan berjalan optimal. Belanja Bantuan Sosial berfungsi sebagai mekanisme jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang menjaga agar modal manusia tidak mengalami depresiasi akibat kemiskinan ekstrem. Melalui

penyaluran bantuan sosial, pemerintah menjaga daya beli masyarakat agar tetap mampu memenuhi kebutuhan asupan nutrisi dan kesehatan dasar. Dalam dimensi IPM, belanja bansos berperan langsung dalam menjaga standar hidup layak, yang merupakan pondasi ekonomi bagi individu untuk terus menginvestasikan kemampuan mereka pada jenjang yang lebih tinggi.

Belanja bantuan sosial menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketiga dimensi utama IPM pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak. Pandangan teoritis ini sejalan dengan temuan Hidayat dan Rahman (2020) yang menunjukkan bahwa peningkatan alokasi belanja bantuan sosial berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di Indonesia, khususnya melalui dimensi pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin besar dan efektif belanja bantuan sosial yang direalisasikan oleh pemerintah, maka semakin tinggi pula tingkat pembangunan manusia yang dicapai.

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disajikan, diperkuat dengan penelitian terdahulu bahwa pendapatan asli daerah, dana otonomi khusus dan belanja bantuan sosial akan diuji pengaruhnya.



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan penelitian, yang dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat serta pernyataan yang dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan hanyalah didasarkan kepada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang telah diperoleh melalui pengumpulan data.

Adapun hipotesis ini dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Papua periode 2005-2024.
2. Diduga secara bersma-sama Pendapatan Asli Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Belanja Bantuan Sosial berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Papua periode 2005-2024.